

Respon Gereja Terhadap Isu Etnisitas dan Agama dalam masyarakat Multikultural

Devrinho Julliard^{1*}, Izak Lattu², Tony Tampake³

¹⁻³Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi*: devrinho@gmail.com¹, izak.lattu@uksw.com², tony.tampake@uksw.edu³

Abstract

Rejection of leaders of different religions, ethnicities and so on is the main in the 2017 DKI Jakarta Governor Election, especially narratives of indigenous and non-indigenous sentiment. The church should take a role in responding to this problem. The research method that the author will use in this paper is the qualitative method of descriptive analysis. The author will also analyze the problem of why ethnicity is used as a political tool and will explore how the issue of ethnicity occurs in Indonesia and the functional role of the church in seeing this. This research uses theories about identity politics, religion in the public sphere by Habermas, Talcott Parsons' structural functionalism and Hendropuspito's religious functionalism. In a social society, of course religion as a social institution has a role and function in responding to situations that occur around it. The church does not mean being silent but has a prophetic voice to respond to this. This shows an important transformative role, namely instilling the value of renewing understanding in church members and the surrounding community about the importance of living together in a multiethnic society.

Keywords: ethnicity issues; identity politics; role of the church; religious issues

Abstrak

Penolakan pemimpin yang berbeda agama, etnis dan sebagainya menjadi perhatian utama dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 terkhususnya narasi sentimen pribumi dan nonpribumi. Seyogyanya gereja mengambil peran untuk menanggapi permasalahan itu tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam makalah ini adalah metode kualitatif analisis deskriptif. Penulis juga akan menganalisa akan permasalahan mengapa etnisitas digunakan sebagai alat politik dan akan mengulik bagaimana isu etnisitas terjadi di Indonesia dan peran gereja secara fungsional melihat hal tersebut. Penelitian ini menggunakan teori tentang politik identitas, agama di ruang publik Habermas, fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan fungsional agama Hendropuspito. Dalam sebuah tatanan masyarakat sosial, tentunya agama sebagai institusi sosial memiliki peran maupun fungsi dalam merespon situasi yang terjadi di sekitarnya. Gereja bukan berarti diam tetapi memiliki suara kenabian untuk merespon hal tersebut. Hal ini terlihat peranan penting dalam hal transformatif, yaitu menanamkan nilai pembaharuan pemahaman kepada warga gereja maupun masyarakat sekitarnya akan pentingnya kehidupan bersama dalam masyarakat multietnis.

Kata Kunci: isu agama; isu etnisitas; peran gereja; politik identitas



Article History:

Received: 28 Februari 2025
Revised: 17 Juli 2025

Accepted: 26 Juli 2025
Published: 03 Agustus 2025

Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia, terkhususnya dalam kontestasi politik, isu etnisitas mempunyai peran penting di dalamnya. Peranan tersebut bahkan seakan menjadi sebuah dasar sebuah komunitas untuk menyikapi sesuatu hal yang terjadi dan bahkan sampai disalahgunakan. Di Indonesia keberagaman menjadi hal yang dianggap wajar, karena masyarakatnya yang terdiri dari berbagai macam etnis. Isu mengenai etnisitas sangat tampak di dalam beberapa kontestasi politik di Indonesia (Dhani, 2019). Dapat dilihat pengaruh etnisitas dalam kontestasi politik DKI Jakarta pada tahun 2017, penolakan pemimpin yang berbeda agama, etnis dan sebagainya.

Beberapa Tahun lalu, tepatnya di tanggal 2 Desember 2016 di Kota Jakarta dapat dikatakan sebagai salah satu aksi massa terbesar yang ada di dalam sejarah Indonesia. kejadian tersebut dikenal sebagai aksi 212 kemudian terdapat berbagai aksi lanjutan yang mengatasnamakan alumni 212. Aksi tersebut tidak lepas dari partisipasi politik masyarakat dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) Gubernur Jakarta. Aksi ini berawal pada tanggal 27 September 2016 sewaktu Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan kunjungan kerja ke kabupaten kepulauan Seribu. Ia bertemu dengan para warga untuk melakukan pembicaraan mengenai program Pemerintah Jakarta dan pada selingan pidatonya ia menyinggung mengenai surat al-Maidah ayat 51. di dalam aksi tersebut tampak politik praktis dalam pergerakan massa tersebut, yang nantinya juga terlihat akan apa yang mereka tuntut dalam aksinya. Setelah polemik panjang, akhirnya Ahok ditetapkan menjadi tersangka dengan tuduhan penistaan agama. Beberapa pihak menyatakan bahwa Ahok merupakan korban politisasi karena berkenaan dengan kontestasi Pemilihan Gubernur Jakarta (Bhayangkara, 2021).

Selain itu konsepsi tentang penolakan secara implisit terhadap kepemimpinan yang berbeda agama juga terjadi di Indonesia yang juga dilatarbelakangi dengan beberapa pemahaman secara tekstual terhadap kitab suci. Di Indonesia sendiri seorang pemimpin maupun pemangku jabatan seperti presiden atau gubernur dipandang secara idealnya adalah beragama muslim. Kecenderungan ini lahir karena seseorang yang akan memimpin harus sesuai dengan atau yang beragama salah satu komunitas yang mayoritas. Pandangan seperti ini lahir karna pemahaman akan teks-teks keagamaan yang cenderung tekstual saja.

Pada kontestasi politik di daerah Semau dan semau selatan, NTT juga menimbulkan ketegangan di dalam jemaat, contohnya dalam pemilihan kepada desa di suatu daerah dalam lingkup jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) menjadi sebuah persoalan di dalam jemaat. Jemaat menjadi terkotak-kotak karena memiliki perbedaan pemilihan calon kepala desa (Tulle, 2023). Dalam situasi tersebut GMIT berusaha mendampingi jemaat dan merasa bahwa kondisi seperti itu menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab gereja.

Hal yang menjadi perhatian utama dalam sentimen etnis di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 adalah sentimen pribumi dan nonpribumi (orang keturunan bangsa asing), pembentukan identitas pribumi dapat dilihat melalui teori pembentukan identitas oleh Stuart Hall melalui pendekatan Konstruktivisme yang memandang identitas sebagai suatu hasil dari proses sosial yang kompleks yang terbentuk dari ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan pengalaman masa lampau melalui pendekatan ini para elite politik di DKI Jakarta mencoba memobilisasinya menjadi kekuatan politik dalam Pilkada. Pasca pidato Ahok sentimen terhadap etnis golongan keturunan China meningkat dan masuk dalam 5 besar golongan yang tidak disukai warga DKI Jakarta seperti yang dirilis oleh Research and Consulting (SMRC) pada November 2016. Sehingga aksi penolakan Ahok yang dimotori oleh Front Pembela Islam dapat memobilisasi massa aksi yang sangat besar pada 2 Desember 2016, slogan "ganyang cina" menjadi bukti belum mudarnya sentimen antar etnis di DKI Jakarta.

Gereja sejatinya menyadari bahwa isu ras, agama, suku bahkan etnisitas menjadi sebuah fenomena sosial yang berkembang saat ini. Agama merupakan sebuah institusi yang memiliki tugas agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik dalam sistem sosial. Dalam penulisan ini agama dikhususkan sebagai sebuah gereja. Oleh karena itu gereja memiliki fungsi bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Fungsi tersebut adalah, fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial, fungsi profetis, fungsi persaudaraan dan fungsi transformatif.

Permasalahan pada kontestasi politik Pilgub DKI Jakarta 2017 telah diteliti dan ditulis oleh beberapa peneliti. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai *research gap*. Pertama, berjudul "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia" yang ditulis oleh Dina Lestari. Penelitian ini berfokus pada dinamika politik identitas yang dilakukan oleh golongan masyarakat tertentu serta dampaknya yang terdapat di masyarakat (Lestasri, 2019). Kedua, berjudul "Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017" yang ditulis oleh Budiyo. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial, khususnya facebook memiliki peran penting dalam melihat respon yang ada di masyarakat luas. Penggiringan opini oleh beberapa pihak juga berpengaruh terhadap respon yang ada, respon negatif yang muncul mengandung kata-kata kasar dan berbagai sara (Budiyo, 2017).

Ketiga, berjudul "Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017" yang ditulis oleh Muhamad Ridwan Efendi dan Iqbal Syafrudin. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran agama yang memberikan pengaruh pada kontestasi politik pada saat itu, aksi bela Islam membentuk watak situasi politik yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 (Effendi & Syafrudin, 2020). Berbeda dengan tulisan penelitian sebelumnya. Tulisan ini tidak hanya berfokus pada peran agama sebagai bentuk politik identitas tetapi juga berfokus kepada isu etnisitas serta yang terpenting tentang bagaimana respon gereja terhadap situasi dan kondisi pada saat itu. Munculnya isu-isu mengenai etnisitas dan agama tampak dalam masyarakat Indonesia, terkhususnya pada kontestasi politik Pilgub DKI Jakarta 2017 dan berdasarkan hal itu maka seyogyanya gereja mengambil peran untuk menanggapi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan artikel ini akan terfokus kepada Respon Gereja sebagai pranata sosial terhadap isu Etnis dan Agama dalam kontestasi politik di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam makalah ini adalah metode kualitatif analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu library research untuk mendukung penelitian ini dari dokumen primer maupun sekunder. Selain itu, penulis juga akan menganalisa akan permasalahan mengapa etnisitas digunakan sebagai alat politik dan akan mengulik bagaimana isu etnisitas terjadi di Indonesia, terkhususnya dalam konteks kontestasi politik pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Terakhir, peneliti akan menganalisis gereja sebagai pranata sosial merespon situasi sosial di sekitarnya, terkhususnya dalam tulisan ini adalah problematik tentang Pilkada DKI Jakarta 2017 (Gunawan, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Politik Identitas

Politik identitas sendiri merupakan sebuah konsep baru dalam penelitian ilmu politik. Politik identitas merupakan nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik didasarkan pada perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat, wacana ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun penerapannya pada penelitian ilmu politik baru muncul setelah diadakannya simposium pada pertemuan internasional Association of Scientific study of international politic di Wina pada tahun 1994 (Heller & Riekmann, 1996). Berdasarkan pengertian tersebut, politik identitas digambarkan sebagai suatu strategi yang

mengarah pada perbedaan fisik seperti perbedaan antara satu orang dengan orang lain, sedangkan yang terjadi saat ini adalah politik identitas. identitas berkembang tidak hanya mengakui perbedaan fisik dalam identitas tetapi juga perbedaan dalam identitas. Pemahaman yang berbeda mengenai keberagaman suku, budaya, agama, dan antargolongan (SARA) juga dijadikan sarana untuk membedakan identitas antar kelompok (Dhani, 2019). Pertemuan ini mengedepankan konsepsi tentang landasan praktik politik identitas dan kajian dalam bidang ilmu politik.

Agnès Haller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang menekankan perbedaan sebagai kategori politik utama. Setelah kegagalan narasi besarnya, gagasan perbedaan menjanjikan kebebasan, toleransi, dan permainan bebas, bahkan ketika ancaman baru muncul. Politik perbedaan telah menjadi nama baru bagi politik identitas; Rasisme, feminisme biologis dan konflik etnis menempati posisi yang dilarang oleh pemikiran-pemikiran terdahulu. Banyak bentuk-bentuk baru intoleransi dan praktik kekerasan bermunculan (Heller & Riekmann, 1996).

Dalam situasi identitas dan entitas perbedaan yang terfragmentasi, politik perbedaan dan entitas perbedaan, politik perbedaan sangat subur dalam situasi negara dengan konteks masyarakat multikultural dan multi-etnik. Dalam konteks ini, interaksi antar kelompok yang berbeda, khususnya kelompok etnis, harus membangun kerangka etika, dalam hal ini sikap toleransi. Toleransi politik hanya mungkin terjadi dalam suasana politik negara yang demokratis. Sebab toleransi politik sangat dipengaruhi oleh sistem, struktur, dan suasana politik yang berlaku. John Sullivan dalam Hefner menganalisis konsep dan penerapan toleransi politik di tiga negara berbeda: Amerika Serikat, Selandia Baru dan Israel, ditemukan bahwa terdapat tingkat intensitas toleransi yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kesejahteraan ekonomi, struktur dan sistem politik, serta faktor psikologis politik. Konsep politik identitas relevan untuk diterapkan, setidaknya dalam wacana, seiring dengan berkembangnya peta politik masa depan ke arah keberagaman politik, dengan lebih memperhatikan tataran humanistik dan etika.

Geoff Mulgan dalam Hefner, seorang ilmuwan politik, berpendapat bahwa peran moralitas dan perang moral harus ditekankan. Sebab ketika wacana-wacana besar dan ideologi-ideologi besar runtuh, maka peran partai politik pun ikut terpuruk. Etika juga akan lebih diperlukan untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan mendorong perilaku politik yang etis dan bermoral. Senada dengan Mulgan, Walter Lippmann dalam Hefner, dalam filsafat publiknya, mendorong politisi demokratis untuk menghormati etika politik. Memang benar, bahkan di negara-negara demokratis sekalipun, kejahatan kebebasan terbuka akan selalu muncul, oleh karena itu diperlukannya tatanan moral dan etika yang demokratis (Hefner, 2007).

Klaus Von Beyme dalam Hefner menganalisis karakteristik gerakan identitas pada berbagai tahap perkembangannya, mulai dari pra-modern hingga post-modern. Perpecahan mendasar, kelompok suku dan nasional, memunculkan gerakan politik dan sosial yang luas. Dalam hal ini, mobilisasi ideologi diprakarsai oleh para pemimpin. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan dan merebut kekuasaan dari satu pemimpin ke pemimpin baru. Pada periode modern, gerakan muncul dalam arah yang bersyarat dan memecah belah, sehingga memerlukan mobilisasi sumber daya. Terjadi keseimbangan antara mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah, peran pemimpin tidak lagi dominan dan tujuan akhirnya adalah pemisahan kekuasaan. Kemudian dalam perkembangan postmodern, munculnya gerakan-gerakan datang dari motivasinya sendiri, protes-protes muncul lagi dan lagi, tidak ada satu kelompok atau faksi pun yang mendominasi. Pola tindakan dan kegiatan yang dilandasi kesadaran diri yang otonom merupakan tujuan akhirnya (Hefner, 2007).

Munculnya politik etnis diawali dengan berkembangnya rasa identifikasi terhadap suatu suku atau kelompok tertentu. Kesadaran inilah yang kemudian akan melahirkan

solidaritas kolektif dan nasional. Politik etnis mengacu pada politik "masyarakat" dan "etnis minoritas kecil", sedangkan interpretasi masyarakat dapat mencakup negara-bangsa. Dalam wacana politik kontemporer, nuansanya lebih sempit. Dalam konteks ini, kelompok minoritas nasional atau etnis umumnya tidak memiliki wilayah tertentu. Tujuan mereka juga berbeda dengan tujuan kaum nasionalis klasik, mereka tidak menginginkan "penentuan nasib sendiri secara nasional" dalam wilayah nasional (negara). Namun lebih pada menikmati perlindungan dan kemajuan bagi kelompok, terutama bagi individu dalam kelompok tersebut, dalam status quo (Kellas, 1988).

Fukuyama menjelaskan, poros utama politik telah berubah dari fokus kepada isu-isu ekonomi menuju ke fokus politik identitas selama beberapa dekade terakhir (Supratikno, 2023). Lebih lanjut, Fukuyama menyatakan bahwa permasalahan Identitas telah mendominasi politik dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pihak mungkin menganggap perdebatan mengenai identitas atau identitas politik sebagai strategi pengalih perhatian, misalnya isu suku dan agama sering kali hanya digunakan untuk menutupi isu kepentingan partai. Mendefinisikan "rakyat" sebagai musuh yang tidak berwajah dan sering kali tidak disebutkan namanya adalah sebuah peluang yang menguntungkan untuk menghindari diskusi mengenai pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan oligarki. Lebih lanjut dikatakan bahwa populisme pada dasarnya berkaitan dengan polarisasi politik, dramatisasi dan moralisasi. Dapat dikatakan bahwa populisme selalu menjadi sub tipe dari politik identitas. Sebagai "ideologi yang tipis", ia menggabungkan fragmen ide-ide yang saling melengkapi dari tradisi seperti liberalisme, konservatisme, dan sosialisme dengan tujuan membangun atau membangun kembali homogenitas budaya dan etnis masyarakat. Pada saat yang sama, kelompok elit sering kali dikucilkan karena alasan etnis dibandingkan alasan moral (Fukuyama, 2018).

Agama dan Ruang Publik Jurgen Habermas

Habermas dalam teori demokrasi deliberatifnya menerapkan dikursus dalam wilayah politik. Demokrasi deliberatif merupakan proses demokrasi sebagai wadah legitimasi hukum yang dapat tercapai melalui diskursus. Dalam proses tersebut peran negara bukan lagi mengambil sebuah keputusan yang tertutup akan tetapi terbuka dalam dialog yang argumentatif. Diskursus yang dilakukan masyarakat tidak lagi menguasai sebuah sistem politik akan tetapi dapat mengarahkan menuju keputusan-keputusan nantinya (Habermas, 1996).

Ruang publik berasal dari bahasa Jerman "Öffentlichkeit", yang berarti "keadaan yang dapat diakses oleh semua orang. Ruang publik bukanlah milik suatu pihak tertentu, namun tersedia di mana saja untuk dan untuk siapa saja. Ruang publik dapat dipahami sebagai ruang-ruang privat komunitas yang digabungkan menjadi sebuah ruang publik. Tujuan dari ruang publik adalah untuk mengatasi perbedaan antara berbagai kepentingan dengan mencapai konsensus mengenai hal yang sama melalui dialog. Ruang publik merupakan jaringan pertukaran informasi dan pendapat masyarakat. Oleh karena itu, ruang publik tidak bisa bersifat material atau tidak berwujud fisik. Aliran komunikasi diolah menjadi opini publik. Terdapat dua jenis ruang publik, yaitu ruang publik formal dan ruang publik informal. Ruang publik resmi berlangsung di rana institusi pemerintahan. Ruang publik informal adalah sektor non-pemerintah. Ruang publik informal ini menjadi wadah warga beragama untuk mengekspresikan gagasannya (Habermas, 1996).

Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Talcott Parsons adalah tokoh sosiologi Amerika. Pada tahun 1930-an, ketika Parsons kembali ke AS setelah menyelesaikan gelar Doktornya, sosiologi Amerika masih mulai berkembang. Fokus utamanya adalah studi empiris komunitas perkotaan (sosiologi mikro).

Parsons melihat bahwa hilangnya fokus terhadap sosiologi makro. Dalam konteks ini Parsons bertekad untuk memberikan teori tindakan sosial yang sistematis dan bersifat universal. Dia ingin sosiologi menjadi ilmu pengetahuan yang secara teoritis dapat diterapkan pada masyarakat mana pun, dan dia melihat perkembangan teori sebagai hal yang penting untuk pertumbuhan dan pematangan sosiologi. Bagi Parsons, bahwa faktor terpenting dari adanya suatu ilmu adalah teori sistematisnya (Dillion, 2014). Parsons dalam teorinya berusaha mengawinkan konsepsi sosiologi mikro dan makro.

Parsons memandang sistem sosial sebagai salah satu dari tiga cara mengorganisir aksi sosial. Selain itu terdapat tindakan lain yang saling melengkapi, yaitu: sistem budaya yang mengandung nilai dan simbol serta sistem kepribadian individu. Menurut Parsons, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang dipandang sebagai suatu kesatuan. Jika kita memandang sistem sosial secara sepihak, masyarakat adalah gabungan dari banyak sistem kecil, seperti keluarga, sistem pendidikan, dan organisasi keagamaan. Parsons, dalam teori sistem, secara umum menganggap analogi antara masyarakat dan lingkungannya sebagai suatu sistem terbuka. Kedua hal ini saling berinteraksi dan mempengaruhi, baik individu maupun kelompok semuanya merupakan bagian dari masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai norma dan nilai sosial yang menjadi pedoman dan mengatur perilaku. Menurut Parsons, yang penting bukanlah tindakan individu melainkan norma dan nilai (Bahkri & Fibrianto, 2018). Masyarakat, bagi Parsons, adalah sebuah sistem tindakan yang “secara analitis dapat dibagi menjadi empat subsistem utama” tindakan, yaitu: ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Keempat subsistem ini terdiri dari struktur kelembagaan inti masyarakat modern yang didirikan untuk mencapai fungsi ekonomi, politik, integrasi masyarakat, dan sosialisasi budaya yang diperlukan agar masyarakat dapat mempertahankan diri dan beradaptasi terhadap perubahan (Dillion, 2014).

Subsistem harus menjalankan empat inti dalam teori fungsionalisme struktural Parsons, yaitu: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, *Latency* (A, G, I, L). Pertama, *Adaptation* merupakan penjelasan masyarakat sebagai sistem sosial akan selalu mengalami perubahan sosial, sehingga dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Kedua, *Goal Attainment* adalah sebuah masyarakat harus dapat mendeskripsikan dan mencapai tujuannya. Ketiga, *Integration* yaitu setiap sub sistem dari sistem sosial harus terintegrasi satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempertahankan equilibrium atau keseimbangan. Keempat, *Latency* yaitu transmisi nilai-nilai yang umumnya dimiliki bersama antar generasi melalui sosialisasi.

Dalam penerapannya, bagi Parsons penting adanya suatu aktor dalam melaksanakan aksi sosial. Aksi sosial harus terdiri dari: pertama, aktor sosial. Kedua, aktor sosial harus memiliki sebuah tujuan yang konkret yang menjadi dasar melakukan aksi sosial. Ketiga, aksi sosial berangkat dari kondisi konteks sosial tertentu. Keempat, terdapat orientasi nilai yang menjadi dasar dari aktor untuk melakukan aksi sosial. Dalam hal ini aktor sosial tidak dapat dipaksa, artinya melakukan secara sukarela. Akan tetapi tindakan sosial tersebut tetap dibatasi oleh nilai-nilai normatif di dalam masyarakat (Dillion, 2014).

Etnisitas

Kata etnik berasal dari bahasa Yunani kata benda *ethnos*, yang telah masuk ke dalam bahasa modern berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Inggris, sebagai “orang” dan “bangsa.” Namun, turunan “etnis” muncul di akhir abad kesembilan belas ketika sosiolog dan ilmu-ilmu sosial akademik lainnya, masih belum matang secara kelembagaan, terpaksa harus mempertanggungjawabkannya atas konflik sosial yang timbul akibat kehadirannya kelompok imigran di Eropa dan Utara kota-kota Amerika. Saat itulah “kafir” menjadi pengertian ketiga. perbedaan etnis, dapat dideteksi secara analitis. Perbedaan etnis merupakan hal yang paling parah dalam masyarakat asli ketika kelompok dianggap asing

datang untuk tinggal berdekatan. Bahasa mereka, adat istiadat, agama, masakan, dan budaya lainnya praktik-praktik tersebut tampak aneh bagi warga negara yang sudah mapan negara tuan rumah-bahkan ketika nenek moyang mereka sendiri upaya dapat ditelusuri pada kelompok yang mempunyai kebiasaan sosial pernah menjadi orang asing. Sederhananya, etnisitas mempunyai arti penting dalam analisis. Ketika orang-orang yang berbeda dipaksa untuk hidup berdekatan satu sama lain dalam suatu wilayah tertentu atau wilayah politik seperti negara-bangsa modern (Turner, 2016).

Perbedaan etnis menjadi paling krusial ketika negara yang ada tidak mampu mengelola konflik yang pasti terjadi ketika terjadi kelompok di wilayah tersebut bergantung pada aliansi untuk memenuhi kebutuhan mereka. memenuhi kebutuhan mereka akan tenaga kerja yang murah dan berlimpah. Di dalam Amerika Serikat, misalnya, pada abad kesembilan belas abad, kelompok-kelompok Eropa direkrut ke dalam negara bagian timur dan tengah, seperti yang dialami kelompok Asia datang ke negara bagian barat, untuk meredakan penyakit akut kekurangan pekerja untuk kerja paksa di industri, pertanian, dan pertambangan. Di masa perekonomian yang pesat ekspansi, kawasan industri akan menderita kekurangan tenaga kerja. Apapun yang mengganggu pihak dominan kelompok mungkin memiliki mengenai kebiasaan budaya orang-orang orang asing, mereka harus merangkul mereka jika bersifat ekonomi pertumbuhan akan terus berlanjut. Pelukannya hampir tiba selalu palsu dan berumur pendek.

Sangat sering, tenaga kerja asing direkrut dari kalangan yang paling stigma- kelompok yang tergabung di negara tuan rumah, seperti ketika, di Amerika Serikat setelah tahun 1914, Perang Dunia I terputus akses terhadap tenaga kerja imigran Eropa, memaksa pusat industri utara untuk merekrut orang kulit hitam pedesaan Selatan. Biasanya kelompok etnis diundang sebagai (dalam Ekspresi Eropa) “pekerja tamu” untuk bekerja jasa kelas bawah, manufaktur, atau di sektor pertanian. Namun, perbedaan etnis juga bisa meningkat ketika menjadi pekerja imigran dibutuhkan untuk tenaga kerja yang memiliki kemampuan tinggi, seperti ketika, dari kuartal terakhir abad kedua puluh, Masyarakat Asia Selatan memainkan peranan penting dalam hal ini sektor teknologi dan keuangan di seluruh dunia diaspora Eropa. Oleh karena itu, etnis menjadi yang paling menonjol ketika menjadi tuan rumah negara-negara tidak mampu mengelola konflik-konflik itu pasti muncul di antara kelompok etnis baru dan kelompok dominan yang berasimilasi atau di antara kelompok etnis itu sendiri. Konflik etnis bisa saja terjadi pecah menjadi perang terbuka dan perselisihan sipil ketika kedaulatan politik nasional atau negara otoritas daerah melemah (Turner, 2016).

Fakta bahwa kekuatan global, khususnya Amerika Serikat, sebagian besar mengabaikan etnis ini. Situasi di Irak pada kalangan Syiah, Sunni, dan Kurdi menggambarkan peran ekonomi dan kepentingan politik dalam konflik etnis. Sebuah dominasi- kelompok etnis semut yang memiliki kekuatan untuk melakukannya campur tangan dalam konflik antar kelompok lain hanya ketika kepentingannya dipertaruhkan. Oleh karena itu, etnosentrisme tampaknya merupakan hal yang wajar sebagai atribut yang terjadi dari kelompok etnis yang akan melibatkan kelompok saingan dengan kepentingan yang tidak biasa ketika rasa keistimewaan etnis mereka terancam. Kepalsuan pembedaan analitik karena antara ras dan etnis terlihat jelas, dengan demikian, dalam sejauh mana perbedaan etnis berinteraksi dengan realitas politik. Di Amerika Serikat, untuk Misalnya, orang-orang diaspora Afrika diakui diakui sebagai kelompok etnis yang sah, Afrika-Amerika, hanya setelah tahun 1965 ketika Gerakan Hak Sipil di Amerika memaksa orang kulit putih Eropa untuk menerima kewarganegaraan orang kulit hitam (Turner, 2016).

Penggunaan istilah dari pribumi muncul pada masa kolonial Hindia Belanda dalam undang-undang Belanda tahun 1854 oleh pemerintahan Kolonial Belanda yaitu beragam kelompok penduduk asli di Nusantara sebagai bentuk diskriminasi sosial. Pada masa kolonial Belanda adanya segregasi (pemisahan) rasial dalam tiga tingkat: ras kelas pertama

adalah Europeanen (Eropa kulit putih), ras kelas kedua adalah Vreemde Oosterlingen (Timur asing) yang terdiri dari orang Tionghoa, Arab, India maupun non-eropa dan ras yang ketiga adalah Inlander, yang diterjemahkan yaitu "Pribumi" (Laksanan et al., 2020).

Adanya aturan yang mengatur orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 konsekuensi dengan perincian dalam Pasal 1 huruf a dan Pasal 1 huruf b UU No.3 tahun 1946 tentang warga Negara dan Penduduk Negara RI. Pada penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menggunakan contoh untuk orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara dengan istilah "Peranakan", maka penjabaran siapa saja Warga Negara Indonesia dalam UU 1946 No.3 digunakan kriterium turunan yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-undang ini. selanjutnya bahasa sehari-hari untuk orang-orang bangsa Indonesia asli digunakan istilah "asli". Sedangkan untuk orang-orang bangsa lain Pemerintahan menggunakan istilah "Warga Negara Turunan Asing" atau disingkat "TURSING" yang sangat disayangkan yaitu sampai dengan amandemen keempat UUD 1945 tidak diadakan perubahan pada Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dimana masih terdapat kata "Indonesia asli". Menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap etnis tertentu di Indonesia karena masih terdapatnya kalimat "warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli" maka hal ini merupakan pembenaran (legitimasi) atas tindakan diskriminasi pemerintah (negara) terhadap warga negaranya sendiri (Laksana et al., 2020).

Peran dan Fungsi Gereja dalam masyarakat

Dalam sebuah tatanan masyarakat sosial, tentunya agama sebagai institusi sosial memiliki peran maupun fungsi dalam merespon situasi yang terjadi di sekitarnya. Dalam hal ini gereja merupakan sebuah institusi sosial. peranan tersebut dimaksud dalam fungsi-fungsinya di tengah-tengah masyarakat sosial, yaitu: fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial, fungsi profetis, fungsi persaudaraan dan fungsi transformatif (Hendropuspito, 2004).

Fungsi edukatif adalah fungsi agama untuk memberikan bimbingan dalam hal pengajaran-pengajaran rohani dalam pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk memberikan wawasan dengan nilai-nilai keagamaan. Kedua, fungsi penyelamatan, yaitu agama membantu manusia untuk mengenalkan nilai-nilai ketuhanan dan sanggup mendamaikan kembali manusia yang salah dengan Tuhan dengan jalan pengampunan. Ketiga, fungsi pengawasan sosial, yaitu agama merasa memiliki tanggung jawab terhadap norma-norma yang beredar di kalangan masyarakat. Keempat, fungsi profetis, yaitu bentuk pengawasan agama berupa kritik terhadap golongan sosial tertentu. Kelima, fungsi persaudaraan, dalam hal ini agama juga berperan dalam hal memupuk persaudaraan dalam masyarakat. Keenam, fungsi transformatif, yaitu fungsi agama untuk mengubah bentuk masyarakat lama menuju ke hal yang baru, dalam hal ini artinya agama menanamkan nilai-nilai baru contohnya seperti pola pikir dan sebagainya (Hendropuspito, 2004).

Permasalahan awal Isu SARA di Pilgub DKI Jakarta

Dalam pidatonya di Kepulauan Seribu itu Ahok menyinggung mengenai pemilihan gubernur yang akan terlaksana pada tahun 2017 dan surat Al-Maidah 51 (Saputra & Sutiandi, 2020). Dalam pidatonya ia mengucapkan "Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu". Setelah itu pidato Beliau tersebar melalui sosial media unggahan Buni Yani dalam facebooknya yang berjudul: Penistaan Terhadap Agama? Oleh karena unggahan inilah pada akhirnya timbul polemik yang menganggap Ahok telah menistakan al-Qur'an, yang menekankan kalimat:

“nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu” (BBC, 2016).

Dampak dari apa yang dilakukan oleh Ahok membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sikap dan pendapatnya terkait hal tersebut sebagai berikut: Pertama, Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin. Kedua, Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. Ketiga, Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Keempat, Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Kelima, Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Kemudian Majelis Ulama Indonesia memberikan beberapa rekomendasi atas kejadian tersebut: Pertama, pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Ketiga, aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. Kelima, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang (Kami, 2016).

Tentu apa disampaikan MUI menjadikan Ahok semakin tersudutkan dan oleh karena itu seakan merestui apa yang telah dilakukan oleh massa aksi 212. Pada Akhirnya dengan situasi yang begitu rumit, Ahok ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka itu juga menjadi tuntutan utama terlaksananya demo ataupun aksi 212 (Hamdi, 2021). Pada 10 Oktober 2016, Ahok meminta maaf kepada umat muslim dan menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk menistakan al-Qur'an dan Islam. “Saya tidak berniat melecehkan ayat suci al-Qur'an, tetapi saya tidak suka memolitisasi ayat-ayat suci, baik itu al-Qur'an, al-Kitab, maupun kitab lainnya” (Woodward & Nurish, 2016).

Hal ini tampak bahwa bahasa religius dalam kitab keagamaan memiliki makna mendalam dan tidak dapat diucapkan begitu saja dan sakralitas kitab keagamaan terlihat dalam kasus tersebut. Ahok mempunyai alasan mengapa ia sampai menyinggung surat al-Maidah ayat 51, dan alasan itu langsung ia utarakan. Celakanya kondisi kontestasi politik yang membuat seakan ia menistakan kitab keagamaan Islam yang suci. Dalam hal ini penggunaan bahasa dalam kitab keagamaan harus dilihat secara mendalam dalam kacamata sosiologisnya. MUI sebagai lembaga keagamaan di Indonesia juga seakan tidak bersifat netral dan meredam kegaduhan, pernyataan yang mereka keluarkan sangat berbau politis pada akhirnya.

Permasalahan yang terjadi yaitu mengenai penduduk asli “mayoritas” dan pendatang “minoritas” sehingga adanya diskriminasi dari golongan mayoritas merasa akan lebih berkuasa dari pada golongan minoritas Sehingga membuat golongan minoritas akan merasa terkucilkan dalam lingkungannya. Melihat kondisi Jakarta yang merupakan daerah

majemuk, perpecahan dapat dengan mudah terjadi pada daerah yang majemuk yaitu sangat rentan terjadi karena banyaknya perbedaan yang ada dan belum tentu setiap suku maupun etnis yang ada di Jakarta bisa paham dan saling mengerti dengan etnis lainnya. Pada penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2017 isu agama, isu etnis juga turut mewarnai berjalannya proses tersebut, yang menyerang salah satu kandidat yaitu Ahok yang menjadi objeknya, yang menganut agama Kristen dan keturunan etnis China. Etnis China merupakan golongan minoritas di Jakarta secara golongan Ahok berasal dari golongan minoritas karena beragama Kristen dan keturunan etnis China (Laksana et al., 2020).

Peran Gereja dalam merespon permasalahan isu etnisitas dan Agama dalam kontestasi Politik Pilgub DKI Jakarta 2017

Ciri masyarakat di era globalisasi adalah interaksi dan komunikasi yang saling mempengaruhi semakin aktif. Saat ini, hampir mustahil bagi masyarakat untuk hidup dalam kelompok sosialnya tanpa mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan orang di luar kelompoknya. Dunia modern menjadikan seluruh dunia sebagai desa bagi semua orang. Di sisi lain, interaksi dan komunikasi yang intensif tidak bisa dihindari. Di satu sisi, kedekatan hubungan ini menimbulkan kesadaran baru yang menekankan dan memperjelas identitas budaya unik masing-masing kelompok yang terlibat dalam komunikasi. Oleh karena itu, identitas budaya dan agama tentu saja tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Agama dan budaya terus bergerak dan menghadapi tantangan perubahan zaman. Oleh karena itu, agama dan budaya juga senantiasa menegaskan kembali jati diri dan nilai-nilai yang diperjuangkannya agar keberadaannya tetap relevan dan bermakna serta dapat memberikan pencerahan terhadap cara hidup manusia di era yang terus berubah ini.

Perjumpaan dengan budaya lain dapat menggerakkan seseorang atau sekelompok orang untuk menghayati budaya atau agama yang baru. Pertemuan memungkinkan kedua belah pihak untuk bertahan bahkan saling mempengaruhi hingga membentuk budaya baru. Jika pengaruh perjumpaan terlalu kuat, bau lama mungkin masih tersisa. Keunikan budaya masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia ini dipengaruhi oleh India, Cina, Arab, dan Eropa. Dalam proses perjumpaan budaya-budaya tersebut, lahirlah budaya baru seperti yang kita kenal sekarang. Hal ini terlihat dari keberagaman etnis, suku, budaya, dan agama kita.

Tentunya perjumpaan antar golongan budaya, agama maupun etnis ini dapat menimbulkan konflik. Konflik persaingan antar etnis merupakan salah satu masalah utama dalam perjumpaan ini. Persaingan etnis ini dapat sampai pada ranah politik, hal ini disebabkan ada kekuatan pada golongan etnis tertentu yang dapat menekan golongan etnis lainnya (May et al., 2003). Dalam konteks Indonesia hal ini dapat terlihat dalam kontestasi politik Pilgub DKI Jakarta 2017. Sentimen pribumi dan nonpribumi (orang keturunan bangsa asing) terhadap Ahok sebagai calon gubernur pada waktu itu yang berasal dari etnis Tionghoa. Hal tersebut menjadikan adanya gejolak politik identitas di pilkada tersebut, Maka adanya perbedaan antara etnik China dan pribumi menjadikan etnik China sulit untuk di terima sebagai bagian dari Indonesia. Adanya rasisme yang dilakukan terhadap kelompok etnis tertentu yang pada dasarnya karena alasan politik. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat secara umum untuk membenci terhadap kelompok etnis tertentu.

Hubungan antara agama dan ruang publik bahwa kepentingan agama harus menjadi sebuah kesepakatan bersama. Dalam konteks Indonesia toleransi beragama harus di artikan sebagai hal yang dapat mempunyai signifikansi bagi semua orang dan bisa diterima secara universal. Agama dapat ditransformasikan secara universal di dalam ruang publik (Pratiwi et al., 2023). Oleh karena itu peranan agama dalam hal ini gereja menyikapi isu SARA

terkhususnya permasalahan etnisitas dalam konteks Pilgub DKI Jakarta 2017 menjadi peran yang sentral.

Melihat kembali peranan dan fungsi gereja sebagai institusi sosial penulis berfokus terhadap fungsi profetik dan transformatif. Dalam hal ini gereja memiliki peranan penting dalam hal menyikapi fenomena yang terjadi dalam masyarakat sekitarnya. Gereja bukan berarti diam tetapi memiliki suara kenabian untuk merespon hal tersebut. Hal ini juga merujuk kepada gereja yang memiliki peranan penting dalam hal transformatif, yaitu menanamkan nilai pembaharuan pemahaman kepada warga gereja maupun masyarakat sekitarnya akan pentingnya kehidupan bersama dalam masyarakat multietnis.

Implikasi

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai bagaimana respon suatu institusi agama terkhususnya gereja sebagai pranata sosial dalam merespon situasi dan kondisi yang terjadi. Hal tersebut dapat menjadi landasan gereja sebagai pranata sosial bersikap di masa depan ketika terjadi isu-isu yang ada di dalam masyarakat multikultural. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa gereja sebagai pranata sosial memiliki peran penting untuk menjaga keutuhan masyarakat dengan merespon isu-isu yang terjadi di sekitarnya.

Kesimpulan

Permasalahan sosial dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 merupakan masalah etnisitas dan agama. Hal tersebut tampak terhadap isu-isu yang dibangun dengan narasi sentimental terhadap salah satu calon yang dianggap sebagai “non-pribumi”. Isu-isu yang dibangun tersebut dapat menimbulkan perpecahan dan merupakan permasalahan etnisitas yang serius. Politisasi Isu pribumi pada Pilgub Jakarta 2017 di gunakan untuk menjaring suara dimana isu yang digunakan untuk memilih kepala daerah yang berasal dari daerah asal atau pribumi. Ahok yang beretnis tionghoa dan beragama Kristen menjadi “paket komplit” alasan penolakan dirinya menjadi calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2017. Oleh karena itu sejatinya gereja sebagai institusi sosial di Indonesia memberikan respon konkret terhadap permasalahan isu yang terjadi. Bukan berarti gereja mencondongkan pilihan politisnya terhadap satu calon tertentu, akan tetapi isu etnisitas dan agama yang menjadi sorotannya. Dalam menjalankan fungsi profetik dan transformatif di tengah-tengah masyarakat, gereja dapat menyuarakan kebenaran-kebenaran yang tidak berpihak terhadap ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Rujukan

- BBC. (2016). Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>
- Bhayangkara, C. S. (2021). Sejarah Reuni 212: Berawal dari Tuntut Ahok Dipenjara Hingga Jadi Agenda Tahunan. <https://www.suara.com/news/2021/12/02/141553/sejarah-reuni-212-berawal-tuntut-ahok-dipenjara-hingga-jadi-agenda-tahunan>.
- Budiyono, M. (2016). Media Sosial Dan Komunikasi Politik: Media Sosial Sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada Dki Jakarta 2017. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 47-62.
- Dhani, F. W. (2019). Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada. *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, 4(1), 143-157.
- Effendi, M. R., & Syafrudin, I. (2020). Pertalian agama pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(02), 12-27.
- Fukuyama, F. (2018) *Against Identity Politics*. Foreign Affairs,
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms*. MIT Press, 1996.

- Hamdi, S. (2021). Pilkada Rasa Pilpres: Al-Maidah 51 Dan Politisasi Simbol Agama Dalam Kontestasi Politik Di Pilkada DKI Jakarta. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 9-22.
- Hasse, J. (2018). Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia. *Al-Ulum*, 18(1), 61-80.
- Hefner, R. W. (2007) Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan. Impulse.
- Heller, Agnes., R, Sonja Puntsher. (1996) Biopolitics: The Politics of The Body, Race and Nature. Avebury.
- Hendropuspito, D. (2004) Sosiologi Agama. Kanisius.
- Gunawan, Imam. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Kami, I.M. (2016). MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51. https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya#google_vignette.
- Kellas, J. G. (1988). The Politics of Nationalism and Ethnicity: Edisi II. ST Martin's Press
- May, S., Modood, T., and Squires, J. (2004). Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. Cambridge University Press.
- Pratiwi, C. A., Adam, A., & Kamaruddin, S. A. (2022). Habermas Tentang Agama, Negara Hukum, Dan Ruang Publik. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 2(2), 20-26.
- Laksana, T. O. P., Al-Hamdi, R., & Gusmi, A. D. (2020). Politisasi Isu Pribumi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di Media Sosial. *Reformasi*, 10(2), 100-126.
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *Simulacra*, 2(1), 31-37.
- Sahalatua, A. P., Hamid, A., & Hikmawan, M. D. (2018). Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022) (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Sugiyono. (2013) Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, Disertasi. ALFABETA.
- Supratikno, A. (2023). Agama dan Politik. Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.
- Tulle, J. R. (2023). Gereja Dan Pastoral Politik: Suatu Kajian Pastoral Atas Peran GMIT Dalam Pendampingan Bagi Warganya Yang Mengikuti Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Semau Dan Semau Selatan. *CONSCIENTIA: Jurnal Teologi Kristen*, 2(1), 1-21.
- Turner, B. S. (2006) The Cambridge Dictionary of Sociology/ Cambridge Universitu Press.
- Woodward, M., & Nurish, A. (2016). Quo vadis FPI dalam aksi bela islam. *Jurnal Ma'arif*, 11(2).